

Peran Sumber Daya Manusia Terampil: Alisis Kritis Resolusi Problem Pendidikan Pondok Pesantren

Achmad Ridlowi
gengsu.cucuk13@gmail.com

Abstrak

Pendidikan agama yang dilakukan pesantren memiliki peran yang besar dalam mengembangkan teologi multikultural. Meminjam filosofi pendidikan, pendidikan untuk pembebasan bukanlah untuk penguasaan (dominasi). Pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan sosial-budaya. Pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia dan karena itu, secara metodologis bertumpu pada prinsip-prinsip aksi dan refleksi total, yakni prinsip bertindak untuk merubah kenyataan yang menindas. Karena itulah, tantangan pesantren tidak lagi berkuat pada pemberdayaan sumber daya manusia, dengan membuat program, seperti kursus-kursus kerajinan dengan perkakas, peralatan, dan mesin-mesin, menjahit, pertukangan kayu, perabot rumah tangga, tani dan kebun, las dan teknik elektro. Poesantren kini dihadapkan pada tantangan multikulturalisme yang menjadi kenyataan sosial.

Kata Kunci: Konsep Pesantren, Desain Pesantren, Pendidikan Multikultural

Pendahuluan

Pesantren merupakan sebuah lembaga yang hidup dan dinamis. Dinamika pesantren dan interaksinya dengan masyarakat yang dimainkan oleh santri, kiai dan alumni pesantren semakin memperteguh kembali bahwa pesantren merupakan bagian dari infrastruktur masyarakat. Secara mikro maupun makro, pesantren telah berperan menyadarkan komunitas masyarakat untuk berpegang pada idealisme, mengembangkan kemampuan intelektual dan perilaku mulia untuk menata serta membangun karakter bangsa yang makmur dan berkeadaban.

Multikulturalisme yang merupakan titik temu berbagai budaya, meniscayakan kesetaraan dan penghargaan di tengah pluralitas budaya. Peradaban Islam sendiri tidak lain adalah suatu hasil akumulasi pergumulan penganut agama Islam ketika berhadapan dengan proses dialektis antara normatifitas ajaran wahyu yang permanen dengan historisitas pengalaman manusia di muka bumi yang selalu berubah-ubah. Dari sini terlihat bahwa ada dua nilai saling tarik-menarik yang dapat mewujudkan peradaban yang dinamis, dimana wibawa normatifitas wahyu yang terbungkus dalam pengalaman kongkrit kesejarahan manusia di suatu era tertentu dapat diberlakukan dalam era lain. Relevansinya dengan pesantren yang mampu membuat peradaban Islam dinamis, tentunya pada mereka yang cerdas memahami substansi normatifitas wahyu yang berlaku secara universal dalam bingkai historisitas dan kultur manusia yang selalu berubah-ubah.

Dalam konteks ini pesantren dituntut untuk proaktif, merespons kultur masyarakat dengan: *Pertama*, tampil secara kreatif berdialog dengan budaya local dan budaya luar, sekaligus memodifikasinya menjadi budaya baru yang dapat diterima oleh masyarakat setempat dan sesuai dengan nilai-nilai agama. *Kedua*, mengembangkan budaya toleransi sehingga di

dalam masyarakat pesantren akan tumbuh pemahaman yang inklusif untuk harmonisasi agama-agama di tengah kehidupan masyarakat. Pesantren harus menjadi garda depan dalam memerangi fanatisme madzhab, karena imam madzhab sendiri melarang pengikutnya bertaklid kepadanya. Tanpa strategi seperti ini, pesantren hanya akan berfungsi sebagai *counter-culture* yang justru kontra produktif dan seringkali memiliki nilai serta norma yang berbeda dengan kultur lain.

Disinilah, urgensi pemberdayaan pesantren di era multikulturalisme. Melalui simbiosis mutualis antara pesantren dengan institusi, lembaga dan komponen masyarakat yang mampu memberikan kontribusi serta menciptakan nuansa transformatif dan dialogis terhadap budaya lain. Pola kerjasama ini juga dapat dilakukan dalam usaha pengembangan sumber daya pesantren agar dapat memberdayakan diri dalam menghadapi tantangan kontemporer yang semakin kompleks.

Pembahasan

Konsep pesantren dengan pendekatan multikultural

Pesantren sebagai institusi kultural pendidikan Islam menghadapi tantangan dalam merespons identitas cultural masyarakat (budaya lokal) dan budaya luar dengan segala keanekaragamannya. Pesantren yang berkembang dari identitas khusus¹, belakangan ini sedang bergulat secara intens dengan budaya lokal lain yang saling mempengaruhi. Tak pelak, era multikulturalisme adalah tantangan tersendiri bagi pesantren, apakah pesantren mampu menjawab tantangan paradigma kehidupan dibawah payung multiulturalisme yang

¹ Identitas khusus ini maksudnya adalah identitas yang senantiasa apresiatif terhadap dinamika cultural dimana ia ada dan sekaligus responsive terhadap masalah-masalah keagamaan, utamanya dengan kahzanah Islam klasik.

mengandaikan kesetaraan dan penghargaan di tengah pluralitas budaya.

Gambaran tersebut dikemukakan untuk melihat apakah pesantren sudah berani keluar dari kebenaran absolutnya (*absolutely truth*) yang kerap kali meminggirkan identitas kultural yang sudah diyakini oleh masyarakat. Atau dengan kata lain, budaya lokal sebagai entitas yang telah lama hidup bersama masyarakat menjadi terpinggirkan akibat doktrin agama yang diyakini pesantren. Desakan pesantren ini praktis memposisikan budaya lokal berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan subordinat. Apalagi pesantren bisa menjadi kekuatan yang ampuh untuk menghilangkan atau paling tidak memperdaya budaya lokal. Ironisnya, karakter pesantren yang menolak budaya lokal ini banyak diambil dari model keberagamaan (Islam) Timur Tengah yang literal, kaku dan scriptural. Disinilah pentingnya memposisikan paradigma multikulturalisme dalam pendidikan pesantren.

Selanjutnya, paparan tersebut memberi landasan bahwa multikulturalisme menjadi signifikan bagi isu sentral dalam konteks hubungan antar agama dan antar budaya. Multikulturalisme telah menjadi kenyataan faktual di dalam masyarakat global. Karena itu, multikulturalisme adalah sebuah tantangan bagi pengembangan budaya toleran dan pluralis.

Dalam perspektif politik dan budaya, sebagaimana telah dijelaskan dalam sebelumnya, masyarakat multikultural distandarisi dengan parameter: (1) keragaman kultural, (2) Aliansi Etnik, dan (3) terorganisasi secara politik.² Dalam konteks ini, secara alamiah masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang beragam (majemuk), yang ditandai oleh berbagai keragaman suku, agama, ras dan golongan (SARA).

² Jurnal Pesantren, *Pesantren dan Multikulturalisme*, (Jakarta, DEPAG RI, 2002), h. 21

Masyarakat multikultural seperti ini adalah sumber pokok dalam membangun demokrasi modern. Namun, masyarakat multikultural juga memendam potensi rahan terhadap konflik social yang bias mengakibatkan pudarnya keutuhan jalinan harmoni social masyarakat. Dengan kata lain, berbeda-bedanya suku, agama dan budaya adalah suatu modal social, meminjam istilah Pierre Bourdieu, yang apabila dirusak akan menimbulkan malapetaka bagi harmoni social yang mengarah pada konflik sosial.³

Pada domain ini ada tiga kecenderungan yang sering dihadapi dalam masyarakat multikultural, yakni (1) mengidap mengidap potensi konflik yang kronis di dalam hubungan-hubungan antar kelompok, (2) pelaku konflik melihat sebagai all out war, (3) proses integrasi social lebih banyak terjadi melalui dominasi atas suatu kelompok oleh keolompok lain.⁴

Dalam konteks inilah, paradigma multiulruralisme mengandaikan pengembangan teologi inklusif dan pluralis yang riil. Para aras ini, toleransi etnik, budaya dan agama di Indonesia menjadi agenda penting sejak maraknya kekerasan etnik dan agama yang meledak seiring dengan pergeseran molitik mutakhir. Itu sebabnya, pesantren sebagai entitas social memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan teologi multikultural sehingga memberikan pencerahan kepada umat akan arti pentingnya kehadiran etnik, budaya dan agama di dalam komunitas social. Tanpa ini semua, pesantren akan kehilangan peran strategis di zaman multikultural sekarang ini yang menghadirkan banyak konflik, entah agama maupun etnik.

³ Jurnal Antropologi Indonesia. *Multikultural Education In Indonesia And South East Asia*. (Jakarta: Yayasan TIFA, 2004), h. 29

⁴ Jurnal Antropologi Indonesia. *Multikultural Education In Indonesia And South East Asia*.....h. 28

Dalam konteks inilah, pendidikan pesantren sebagai media pembebasan umat dihadapkan pada tantangan bagaimana mengembangkan teologi multikultural sehingga di dalam masyarakat pesantren akan tumbuh pemahaman yang inklusif untuk harmonisasi agama-agama, budaya dan etnik di tengah kehidupan masyarakat. Tertanamnya kesadaran multikultural dan pluralitas kepada masyarakat, akan menghasilkan corak paradigma beragama yang hanief dan toleran. Ini semua harus dikerjakan pada level bagaimana membawa pendidikan pesantren ke dalam paradigma yang toleran dan humanis.

Disinilah signifikansi melakukan rekonstruksi paradigma pesantren yang awalnya berbau feodalistik, dihadapkan dapat menumbuhkan sikap dan pola pikir yang bersahaja untuk menghargai dan menghormati agama-agama dan budaya tanpa konflik di tengah-tengah masyarakat multikultural.

Terkait dengan hal tersebut, untuk menguraikan lebih jauh konsep pesantren berparadigma multikulturalisme, akan dikemukakan berbagai pola pembangunan pesantren dalam frame multikultural, antara lain:

1. Dialektika Pesantren dan Budaya Lokal

Sejatinya, watak dan karakter pesantren yang apresiatif terhadap kebudayaan local adalah watak yang damai, ramah dan toleran. Karena watak pesantren yang demikian ini, tidak menyuguhkan praktek kekerasan (*Penetration Pactifigur*)⁵ untuk mendialogkan pesantren dengan kebudayaan lokal. Hal ini diambil dari kenyataan histories penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan pesantren memunculkan konsekuensi bahwa Islam di

⁵ Junal Pesantren, *Pesantren dan Multikulturalisme*, (Jakarta DEPAG RI, 2002), h. 20

Indonesia lebih lunak dan akomodatif terhadap kepercayaan, praktek keagamaan dan tradisi lokal.

Tak pelak lagi, Islam sebagai agama dan pesantren sebagai media dakwah Islam yang tersebar ke seluruh penjuru Nusantara tampil secara kreatif berdialog dengan masyarakat setempat (lokal), berada dalam posisi yang menerma kebudayaan lokal, sekaligus memodifikasinya menjadi budaya baru yang dapat diterima oleh masyarakat setempat dan masih beada di dalam jalur Islam.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan mulai dari urusan terkecil seperti mengatur urusan rumah tangga sampai dengan urusan terbesar seperti mengatur urusan sebuah negara semua itu diperlukan pengaturan yang baik, tepat dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif.⁶

Pesantren yang kebanyakan berdiri di pedesaan harus berhadapan dengan sekian banyak tradisi budaya asli masyarakat agraris. Namun karena semangat keagamaan yang membumi, pesantren lebih mampu bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyerap budaya setempat. Pesantren terbukti mampu berdialog dengan adat setempat secara produktif dan tidak saling menafikan satu sama lain.⁷

⁶ Ali Mufron, Transformasi : Jurnal Studi Agama Islam Volume 11, No. 1 athun 2018. *Landasan Epistemologis Manajemen Pendidikan Islam dalam AL-Qur'an dan Hadits*, h. 77

⁷ Miski Anwar, *Tradisi Pesantren di Tengah Transformasi Sosial*, dalam *Menggagas Pesantren Masa Depan*, (Yogyakarta: Qirtas, 2003), h. 75

Terhadap tradisi sedekah bumi, nyadran, nyatus, nyewu, miwiti dan sebagainya pesantren menanggapinya dengan pendekatan memberi dan menerima. Pihak pesantren mengambil bentuk (wadah) tradisi budaya tersebut sambil memberikan isi yang baru. Cara pendekatan ini terbukti bisa diterima kedua pihak dengan baik. Maka sekarang terdapat banyak upacara adat, seperti sedekah bumi yang semula diselenggarakan untuk memuja dewa dan roh-roh yang diyakini sebagai penjaga desa, kini berganti isi menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah berkenan untuk memberi kemamuran. Adat miwiti (mulai menuai padi) yang semula diadakan untuk memuja Dewi Sri kini menjadi acara syukuran menjelang panen. Dan, doa-doa yang dibaca adalah doa yang bisa dibaca di pesantren.

Dialog pesantren dan budaya sesungguhnya sejak awal dilakukan oleh wali sanga, utamanya Sunan Kalijaga yang berhasil mengisi spirit Islam kedalam budaya lokal; seperti tradisi *sekaten*, *mitung dino*, *nyatus*, *nyewu* yang diisi dengan tahlil. Begitu juga wayang sebagai tradisi kesenian yang banyak disukai masyarakat, sudah dimodifikasi dengan spirit Islam. Tak heran, jika sekarang ini di beberapa pesantren dan tradisi tahunan yang mementaskan wayang, yang banyak dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Kesemuanya menunjukkan betapa pesantren mampu berdialog dengan budaya lokal.

Namun demikian, tidak selamanya dialog antara pesantren dengan budaya lokal bisa berjalan baik. Hak ini disebabkan pihak pesantren menganggap secara prinsip beberapa unsure tradisi budaya setempat tidak bisa mereka terima. Misalnya kebiasaan berjudi, sabung ayam, minum arak dan sebagainya. Dan dalam hal tidak terjadi persiangan budaya antara pesantren dan ntradisi lokal, maka sering

muncul sikap sinis terutama dari pihak adat yang ditujukan kepada mereka yang tidak bisa menerima kebiasaan berjudi.

2. Pesantren dan Corak Keberagamaan Inklusif

Apabila mengacu pada kenyataan bahwa pesantren adalah pendidikan alternatif yang dijadikan harapan bagi masyarakat sebagai ruang belajar agama yang kondusif, maka niscaya bagi pesantren untuk memahami adanya kenyataan keragaman dalam masyarakat. Keragaman ini tentu saja menuntut adanya perilaku dan pola sikap penghargaan dan keterbukaan (inklusif) terhadap berbagai perbedaan tersebut. Untuk itulah, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dituntut mensosialisasi pola pemahaman yang ramah realitas dan dapat diterima oleh kelompok-kelompok yang berbeda-beda, khususnya di wilayah keyakinan dan keberagamaan.

Keniscayaan untuk mensosialisasi pola pemahaman keberagamaan yang inklusif ini dilatarbelakangi pula oleh adanya berbagai konflik yang dimotifasi oleh agama. Fenomena konflik antar agama sesungguhnya telah terjadi semenjak berabad-abad yang lalu. Dan tentu saja hal itu menjadi kenyataan pahit yang menyangkut kehidupan ummat beragama.

Semenjak beberapa dekade terakhir, kasus-kasus pertentangan dan konflik agama di Indonesia kerap kali terjadi. Konflik ini terjadi, baik antar pemeluk agama, maupun antara golongan di internal agama. Misalnya apa yang terjadi di Maure (1995), Surabaya, Situbondo dan Tasik Malaya (1996), rengas Dengklok (1997), Jakarta, solo dan Kupang (1998), Poso, Ambon (1999-2002).⁸ Buramnya catatan keberagamaan Indonesia ini bukan saja telah

⁸ M. Ainul Yakin. *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 74

banyak merenggut koban jiwa yang sangat besar, akan tetapi juga telah menghancurkan ratusan tempat badah terbakar hancur.

Faktor utama terjadinya konflik keagamaan tersebut diatas adalah adanya paradigma keberagamaan masyarakat yang eksklusif. Pemahaman keberagamaan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena pemahaman ini dapat membentuk pribadi yang natipati terhadap pemeluk agama lainnya. Pribadi yang tertutup dan menutup ruang dialog dengan pemeluk agama dan kelompok lain. Pribadi yang selalu merasa hanya agama dan alirannya saja yang paling benar sedangkan agama dan aliran keagamaan lainnya adalah salah satu salah dan bahkan dianggap sesat. Selanjutnya, dari aras inilah muncul keyakinan untuk memerangi kelompok lain yang dianggap sesat tersebut yang disebut dengan “perang suci” (the holy war). Inilah yang sesungguhnya menjadi landas tumpu terjadinya konflik agama.

Lebarnya potensi konflik, dengan demikian, salah satu faktornya harus juga diidentifikasi dan dibaca kemunculannya dari pesatren yang masih memegang paradigma lama (*old paradigm*) yang eksklusif dan intoleran. Paradigma pendidikan eksklusif dan intoleran ini jelas-jelas akan mengganggu harmonisasi masyarakat multi etnik dan agama. Dengan demikian, filosofi pendidikan pesantren yangf eksklusif tidak relevan lagi di zaman multicultural. Sebab, jika cara pandanganya bersifat eksklusif dan intoleran, maka teologi yang diterimanya adalah teologi eksklusif dan intoleran pula, yang pada gilirannya akan merusak sikap penghargaan terhadap setiap perbedaan.

Untuk itulah maka sangat perlu untuk membangun upaya-upaya preventif agar masalah pertentangan nagama

tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Mengintensifkan forum-forum dialog, membangun pemahaman keagamaan yang lebih pluralis dan inklusif, serta memberikan pendidikan tentang pluralisme dan toleransi ebragama melalui lembaga-lembaga pendidikan adalah beberapa upaya preventif yang dapat diterapkan. Dalam konteks ini, pesantren mempunyai potensi yang sedemikian besar untuk mengambil peran-peran organic, yaitu mengajarkan nilai-nilai rahmat dan kasih sayang antar sesama umat islam (ukhwah islamiyah), harmonitas relasi antar manusia (ukhwah basyariyah), dan peran-peran masyarakat dalam mendukung huibungan antar suku dan etnis (ukwah wathaniyah).

Jika dalam penjelasan sebelumnya, dipaparkan perihal umum terkait dengan semangat membangun teologi multicultural di pesantren, maka untuk lebih jelasnya disini akan dikemukakan nilai-nilai keagamaan yang ramah terhadap keragaman sekaligus maksud dari nilai-nilai tersebut, untuk mencegah agar pemahaman keagamaan masyarakat eksklusif tidak terus berkembang, antara lain⁹:

- a. Nilai inklusif pluralis, berarti dapat menerima pendapat dan pemahaman agama lain yang memiliki basis ketuhanan dan kemanusiaan.
- b. Nilai multicultural, berarti menerima adanya keragaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan.
- c. Nilai humanisme, berarti mengakui pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dengan menghormati hak asasi orang lain, peduli terhadap orang lainb dan berusaha membangun perdamaian dan kedamaian bagi seluruh umat manusia.

⁹ M. Ainul Yakin. *Pendidikan Multikultural*.....h. 35

- d. Nilai Dialog-persuasif, berarti lebih mengedepankan dialog dan cara-cara damai dalam melihat perselisihan dan perbedaan pemahaman keagamaan dari pada melakukan tindakan-tindakan fisik seperti terror, perang dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
- e. Nilai kontekstual, berarti menerapkan cara berpikir kritis dalam memahami teks-teks keagamaan, meskipun ada teks-teks keagamaan yang tidak dapat diganggu gugat akan tetapi tidak sedikit dari teks-teks keagamaan tersebut yang membutuhkan interpretasi-interpretasi kritis dalam upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan keagamaan terkini.
- f. Nilai Subsantif, berarti lebih mementingkan dan menerapkan nilai-nilai agama daripada hanya melihat dan mengagungkan symbol-simbol keagamaan.
- g. Nilai aktif sosial berarti agama tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan rohani secara pribadi saja. Akan tetapi yang terpenting adalah membangun kebersamaan dan solidaritas bagi seluruh manusia melalui aksi-aksi sosial yang nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Dengan membangun dan mengimplementasi nilai-nilai keagamaan tersebut diharapkan kerangka universalitas yang ada dalam agama seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, perdamaian dan kesejahteraan umat manusia dapat ditegakkan. Lebih khusus lagi, agar kerukunan dan kedamaian antar umat beragama dapat terbangun. Nah pada konteks inilah sebenarnya visi dan misi pesantren berparadigma multicultural mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Pesantren ditengah Realitas Demokrasi dan Penguatan Masyarakat Madani

Dalam perspektif multicultural, pendidikan pesantren niscaya diposisikan *setali tiga uang* dengan proses demokratisasi dan penguatan masyarakat madani. Hal ini dikarenakan pola pemberdayaan masyarakat (*social engineering*) baik di level mikro maupun makro, akan terlaksana dengan baik manakala implementasi demokrasi dan masyarakat madani dapat ditegakkan. Penegakan nilai-nilai demokrasi dan semangat yang terkandung dalam masyarakat madani ini sesungguhnya mempunyai peran dan posisi yang seiring dengan misi multikulturalisme.

Maka itu, dalam sub bab ini akan ditegaskan bagaimana reposisi pesantren ketika berhadap-hadapan dengan konsep-konsep mutakhir demokrasi dan masyarakat madani ini.

Komunitas pesantren, sebagai salah satu komunitas dalam masyarakat Indonesia, memiliki posisi yang signifikan dalam masyarakat muslim di Indonesia. Ditinjau dari sisi produktifitas santrinya, pesantren adalah warna tersendiri, dimana para santri dapat secara langsung mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di daerah asalnya maupun di lingkungan pesantren. Di pihak lain, mayoritas alumni pesantren mempunyai posisi strategis di kalangan masyarakatnya, baik sebagai pemuka agama maupun sebagai petinggi desa. Kepercayaan yang diberikan kepada mereka ini pada prinsipnya merupakan peluang tersendiri bagi pesantren untuk mensosialisasi nilai yang terkandung dalam demokrasi dan masyarakat madani, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses pembudayaan sistem ini.

Oleh karenanya, santri harus lebih dahulu memahami sistem demokrasi dan pola konseptual dalam

masyarakat madani, sehingga perlu adanya pendidikan demokrasi dan masyarakat madani di lingkungan pesantren. Pendidikan demokrasi dan masyarakat madani ini diharapkan akan menghasilkan santri-santri yang disamping memiliki wawasan keagamaan, juga memiliki wawasan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang menghargai nilai-nilai demokrasi. Pada saat ini, membicarakan pendidikan demokrasi di pesantren menjadi lebih penting, ketika hampir dalam setahun terakhir ini terjadi peristiwa-peristiwa agresifitas massa di beberapa daerah santri, meskipun pada umumnya mereka sendiri tidak terlibat dalam peristiwa itu.

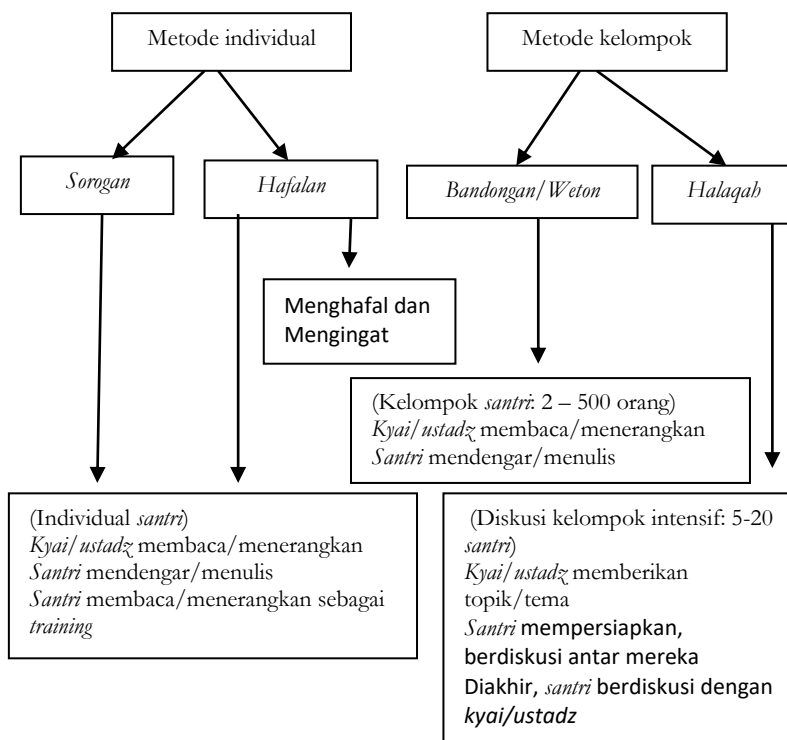
Desain Pesantren Multikultural

Setelah mengurai berbagai kelemahan yang diderita oleh pendidikan agama dan kaitannya dengan pesantren, telah diketahui sejauh mana capaian pendidikan agama dalam mengimplementasi nilai toleransi, penghormatan dan pengenalan jenis keyakinan. Mengingat adanya kegagalan kebijakan pemerintah selama hampir empat dekade dalam mengatur pluralitas agama, kekayaan budaya dan keanekaragaman karakteristik kepulauan di Indonesia, maka menjadi penting untuk memposisikan pesantren dalam kontribusinya terhadap berbagai ketimpangan dan kegagalan pendidikan formal, khususnya pendidikan agama di Indonesia.

Untuk itu, penulis akan mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana model dan pola pendidikan pesantren yang selama ini ada. Setidaknya ada dua kecenderungan model pendidikan dalam pesantren yang dapat dijadikan pedoman rujukan. Pertama, pesantren bermodal salafiyah; dan kedua, pesantren bermodel modern. Keduanya, baik salafiyah maupun modern, pada dasarnya mewarisi metode

yang sama, dengan pembagian metode individu dan metode kelompok. (Lihat tabel II)

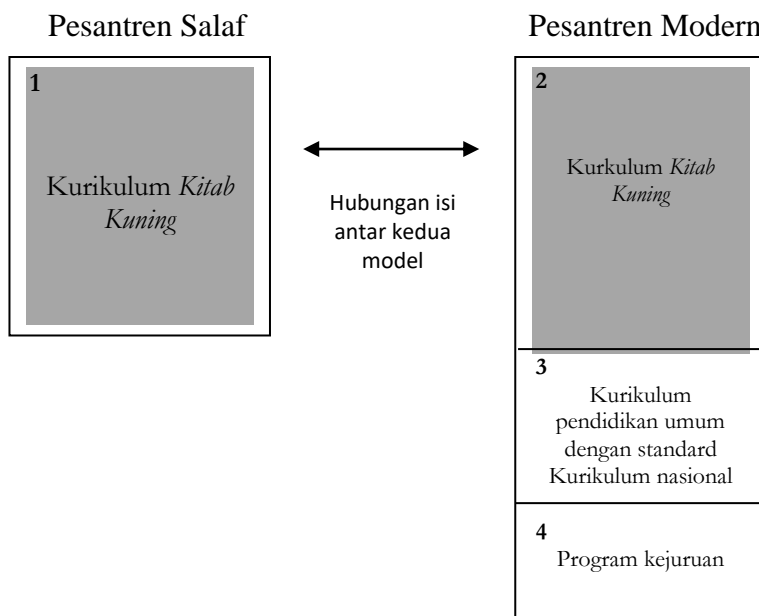
Tabel II
Metode Umum Pengajaran Pesantren¹⁰



¹⁰ Raihani, *Curriculum Construction In The Indonesian Pesantren: A comparative case study of curriculum development in two pesantrens in South Kalimantan*. Karya ilmiah disampaikan di Jakarta, 20 Februari 2003.

Selanjutnya dibawah ini dijelaskan perbandingan antara kurikulum salaf dan modern. (Lihat Tabel III)

Tabel III
Perbandingan model kurikulum Salaf dan modern¹¹



Model Pesantren Salaf

Tidak berlebihan jika pesantren salaf merupakan genuie bagi berkembangnya pesantren di Indonesia. Hal ini dikarenakan pesantren salaf merupakan manifestasi dunia pesantren yang berusaha untuk tetap berada dalam rel tujuan awal pendiriany, yakni sebagai lembaga syi'ar (dakwah) dan pendidikan agama Islam. Sebagai sebuah lembaga pendidikan

¹¹ Raihani, *Curriculum Construction In The Indonesian Pesantren ...*

Islam, pesantren salaf di awal perkembangannya hanya mengajarkan agama dengan sumber mata pelajaran berupa kitab-kitab berbahasa Arab yang masu dalam kategori *mu'tabarah*. Pelajaran yang biasanya dikaji meliputi: Al Qur'an dengan tajwid dan tafsirnya, hadits dengan musthalahnya, bahasa Arab dengan nahwu, sharf, balaghah, arudl, dan mantiqnya, fiqih dengan hukum-hukum dan ushul fiqihnya, serta akhlaq dengan warna tasawufnya. Kitab-kitab yang dipakai, pada umumnya juga terbatas pad hasil karya ulama abad pertengahan (antara abad 12 – 15) yang kemudian lebih dikenal dengan istilah kitab kuning.¹²

Pesantren salaf, dalam aplikasi pendidikannya menggunakan metode *wetonan*. Wetonan merupakan metode kuliah, yaitu metode dimana para santri mengikuti pelajaran dan mendengarkan ceramah sambil duduk di sekeliling kiai yang sedang menerangkan pelajaran. Metode ini hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu oleh seorang kiai, milsanya sebelum atau sesudah melakukan shalat fardhu. Hal ini sejalan dengan terminologi *wetonan* yang diambil dari bahasa Jawa (eweton) yang berarti waktu. Selain itu, metode sorogan menjadi metode pendidikan yang digunakan dalam pesantren salaf.

Disamping adanya kegiatan-kegiatan pengajaran seperti diatas, sebagai lembaga pendidikan, pesantren salaf sangatlah memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman tingkah laku. Bahkan melalui proses penanaman tata nilai dan tata laku, pesantren telah berhasil mengidentifikasi eksistensinya sebagai lembaga yang bercirikan:

Pertama, adanya hubungan akrab antara kiai dan santri. Hal ini dimungkinkan karena mereka tinggal bersama dalam satu kompleks lingkungan pesantren. *Kedua*, pola interaksi

¹² Jurnal Pesantren, Jurnal Pesantren, *Pesantren dan Multikulturalisme...* h.49

subordinatif. Para santri harus tunduk terhadap kiai dan menganggap bahwa menentang kiai selain tidak sopan juga bertentangan dengan agama Islam. *Ketiga*, pola hidup hemat dan sederhana. Kesederhanaan seringkali dijadikan sebagai prasyarat untuk mencapai keberhasilan. Bahkan, tidak jarang para santri terlalu sederhana dalam menjalani hidupnya sehingga mengabaikan nilai gizi dan kesehatan badannya. *Keempat*, pola hidup mandiri. *Kelima*, suka tolong menolong dan hidup dalam suasana pergaulan dan persaudaraan. *Keenam*, pola hidup disiplin. Hal ini disebabkan kebiasaan mereka untuk menyesuaikan kehidupannya sesuai dengan jadwal ketat dan padat yang telah dibuat oleh kiai. *Ketujuh*, pola hidup prihatin.

Dari karakteristik dan model pendidikan pesantren salaf, setidaknya diketahui beberapa celah untuk mengimplementasikan pesantren multicultural, khususnya pada pembinaan tata nilai dan tata laku tersebut diatas.

Model Pesantren modern

Pesantren modern muncul sebagai usaha dunia pesantren untuk mengakomodasi perubahan zaman dan arus modernisasi. Dengan kata lain, pesantren moden muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap ortodoksi paradigma pesantren salah dalam menyikapi perubahan-perubahan yang ada. Tetapi, sama halnya dengan pesantren salaf, pesantren modern juga merupakan lembaga pendidikan yang memiliki materi dan metode tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, pesantren modern juga berorientasi keislaman sebagaimana pesantren salaf. Bedanya, pesantren modern lebih inklusif atau tidak terjebak dalam politik *non cooperative* dalam menentukan materi pendidikannya. Artinya pesantren modern dalam menyusun

kurikulumnya tidaklah *Ghazali oriented*. Pada aras ini, pesantren moern lebih terbuka untuk menerima hasil karya intelektual muslim kontemporer, dari mulai Muhammad Abduh hingga Yusuf Qardhawi.

Kemudian, dalam proses pembelajarannya, dengan alasan efisiensi pengajaran, metode wetonan, sorogan yang dikenal di pesantren salaf, oleh pesantren modern dimodernisasi dengan sistem klasikal (penjenjangan) yang dipimpin secara terorganisasi, dengan waktu yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikannya. Melalui sistem penjenjangan kelas ini, ustadz/kiai diharapkan dapat berimprovisasi menentukan metode yang paling cocok dalam mendidik santri, apakah itu ceramah, dialog, diskusi, muhadzarah, ataukah lainnya. Fleksibilitas dalam penerapan metode ini diharapkan dapat menghasilkan produk santri dalam jumlah besar, berkesinambungan dan bermutu, dengan biaya dan waktu yang relatif singkat.

Dengan demikian, agaknya pesantren modern berusaha menerapkan asas evaluasi secara jelas dan tegas dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui sistem penjenjangan kelas ini, kualitas santri pada tiap jenjangnya dapat dikontrol dengan baik. Selain itu, pesantren modern juga sudah mulai mempertimbangkan waktu, strategi dan materi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Selain itu, pola hubungan antara kiai, santri dan ustadz menjadi jelas batas-batas hak dan kewajibannya, sehingga pola interaksi subordinatif semakin kabur.

Penutup

Pesantren mempunyai banyak dimensi yang terkait, plural, tidak seragam, dan tidak memiliki wajah tunggal. Pesantren kelihatan berpola seragam, tetapi beragam: tampak konservatif tetapi secara diam-diam atau terang-terangan

mengubah diri dan mengimbangi denyut perkembangan zamannya. Ia merupakan suatu lembaga pendidikan klasik dan mungkin paling tradisional, yang melestarikan budaya klasik, akan tetapi justru semakin survive, dan bahkan dianggap sebagai alternatif dalam era globalisasi dan modernisasi dunia seperti ini.

Seiring dengan perkembangan dunia, peantren dihadapkan pada beberapa fenomena perubahan sosial dan multikulturalisme yang tak terelakkan. Kemajuan teknologi informasi, dinamika sosial-politik, dan sejumlah perubahan yang terbingkai dalam dinamika masyarakat. Semuanya berujung pada pertanyaan tentang resistensi, responsibilitas, kapasitas dan kecanggihan pesantren dalam menghadapi perubahan besar itu. Sejauh mana peran pesantren dalam merespon multikulturalisme yang berkembang di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali Al Jumbulati & Abdul Futuh At Tuwaanisi. 2002. *Perbandingan Pendidikan Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Ali Mufron, Transformasi : Jurnal Studi Agama Islam Volume 11, No. 1 tahun 2018. *Landasan Epistemologis Manajemen Pendidikan Islam dalam AL-Qur'an dan Hadits*.
- Bobbi De Porter & Mike Hernacki, 2002. *Quantum Learning*. (Bandung: Kaifa).
- Djamaludin & Abdullah Aly. 1998. *Kapita Selekta*. (Bandung: Pustaka Setia)
- H.M. Arifin. 2003. *Ilmu Pendidikan Islam Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. (Jakarta: Bina Aksara)
- Imam Machali & Musthofa. 2004. *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media).

- M. Ainul Yakin. 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*. (Yogyakarta: Pilar Media).
- Majalah Pesantren. *Pesantren dan Multikulturalisme*. Edisi III/Th.I/2002 diterbitkan oleh Depag RI dan Lakpesdam NU.
- Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, MA. 2004. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana)